

Pembelajaran PPKn sebagai Perekat Sosial Masyarakat Multikultural dan Edukasi Harmoni Sosial

Bambang Sumardjoko¹, Harun Joko Prayitno², Agus Prasetyo³

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta

³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: bs131@ums.ac.id

Abstrak

Keywords:
pembelajaran PPKn;
Perekat social; edukasi
harmoni sosial

Secara umum tujuan penelitian adalah mengembangkan model optimalisasi fungsi manajemen dalam pembelajaran PPKn berbasis kebhinekaan sebagai perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial siswa SMA/SMK di kota Surakarta. Namun secara khusus dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan (1) bentuk-bentuk perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial, (2) praktik manajemen pembelajaran PPKn, dan (3) kebutuhan optimalisasi manajemen pembelajaran PPKn berbasis kebhinekaan sebagai perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial. Penelitian dilaksanakan dengan desain research and development. Subjek penelitian adalah para siswa dan guru PPKn di SMA/SMK kota Surakarta. Hasil penelitian ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, siswa SMA/SMK Kota Surakarta mewujudkan sikap kebhinnekaan sebagai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial dalam aktivitas di sekolah dengan bentuk menghargai pendapat, mengakui perbedaan, ramah dalam pergaulan, dan berfikir positif terhadap perilaku teman. Kedua, dalam praktik pembelajaran, guru PPKn melaksanakan instruksi Kurikulum 2013 dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dan praktik di kelas yang mengacu pada pendekatan ilmiah. Ketiga, guru PPKn dalam optimalisasi fungsi manajemen membutuhkan bimbingan dari perguruan tinggi, tambahan dana, fasilitas, kemudahan mengikuti seminar, dan pelatihan informasi teknologi (IT).

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri atas banyak ragam, yakni suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dalam satu sisi, keragaman masyarakat Indonesia merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Namun dalam sisi lain, keragaman tersebut bila tidak disikapi secara arif dapat menimbulkan kerawanan sosial. Berbagai peristiwa, seperti konflik Poso tahun 1998, Bom

Bali tahun 2000, konflik Sampit tahun 2001, dan konflik Mesuji tahun 2003 merupakan bukti adanya konflik multikultural. Bahkan, tercatat dari tahun 2014 terdapat 74 kasus intoleransi beragama, tahun 2015 bertambah menjadi 87 kasus, dan tahun 2016 lebih dari 87 kasus.

Membangun masyarakat Indonesia yang multikultural, khususnya di jalur pendidikan formal

tidak mudah karena harus melibatkan peran seluruh pihak. Menurut Rosyada (2014), Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan hal itu sangat penting untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama. Pendidikan multikultural di Indonesia memberikan penghargaan terhadap keragaman dan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan sebagai identitas nasional di mata dunia internasional. Sekolah perlu mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum, dan guru yang mempunyai persepsi multikultural sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswa [1].

Kemajemukan yang tidak disikapi secara arif akan menimbulkan jarak sosial sehingga berpotensi disintegrasi sosial. Diperlukan upaya pembinaan agar tercipta budaya damai, menghargai hak asasi manusia, dan menjamin ikatan-ikatan sosial. Menurut Furnivall (dalam Azra, 2006), masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai. Menurut Adhani (2014), pendidikan multikultural bisa dimanfaatkan sebagai sarana alternatif pencegahan konflik. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, suku, agama, ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dengan cara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis,

integrated dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan realitas multikultural yang ada di masyarakat Indonesia merupakan kekayaan dan kekuatan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan [2,3].

Selain pendidikan multikultural, siswa juga perlu diberikan pemahaman tentang harmoni sosial yang bisa diwujudkan dalam pendidikan perdamaian. Menurut Samiyono (2017), pendidikan perdamaian dan multikultural perlu ditanamkan kepada setiap elemen masyarakat baik dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kondisi ini menjadi penting supaya ada kesadaran bersama sebagai suatu bangsa yang mempunyai keanekaragaman budaya dan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut yang menjadi fondasi kekuatan bangsa Indonesia, sehingga jangan sampai budaya luar yang lebih konsumeristik akan menghancurkan kearifan local [4].

Salah satu strategi untuk mengantisipasi permasalahan terkait multikultural dan harmoni sosial pada masyarakat Indonesia adalah dengan memperkuat pembelajaran dan praktik pendidikan di sekolah. Hal ini karena sekolah menyediakan ruang untuk memperkuat basis pengetahuan dan pengalaman hidup siswa sehingga mampu menghargai adanya perbedaan dan kemajemukan (Sa'dijah, Cholis, 2009). Pasal 3, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” [5].

Salah satu sarana penanaman nilai-nilai multikultural dan harmoni sosial pada siswa adalah dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pembelajaran PPKn yang diberlakukan mulai dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dimaksudkan mampu membentuk watak warga negara yang mengetahui, menyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945. PPKn sebagai mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan mempunyai misi sebagai pendidikan nilai untuk warga negara muda usia, upaya untuk menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalannya melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Dengan kata lain, pembelajaran PPKn dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperanserta sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembelajaran PPKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen, saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela Negara [6]

Namun, di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn sering dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. Proses pembelajaran sering dipersepsi tidak mendorong kemampuan siswa untuk

berpikir kritis. Hal ini bisa jadi disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic virtues, (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif. Akibatnya proses pembelajaran menimbulkan kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik [7].

Berdasarkan deskripsi di atas maka perlu dikembangkan pembelajaran PPKn yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa, yakni pembelajaran yang mampu merealisasikan tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah warga Negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisitasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang multikultur secara tertib, damai, dan kreatif. Untuk itu maka proses pembelajaran perlu diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Mencermati urgensi tujuan pembelajaran PPKn di atas maka pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis kebhinekaan sebagai perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial perlu dilakukan. Untuk kepentingan itu maka penulisan ini dimaksudkan (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial, (2) mendeskripsikan praktik manajemen pembelajaran PPKn, dan (3) mendeskripsikan kebutuhan optimalisasi manajemen pembelajaran PPKn berbasis kebhinekaan sebagai

perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian pengembangan ini dimaksudkan mendeskripsikan pembelajaran PPKn di SMA/SMK yang berbasis kebhinekaan sebagai perekat sosial pada masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial. Penelitian pengembangan ini dipilih karena memiliki keunggulan, terutama jika dilihat dari prosedur kerjanya (Gall & Borg, 2003). Juga, karena dapat digunakan untuk mencermati kebutuhan dan situasi nyata SMA / SMK di kota Surakarta, sistematis, dan bersifat siklis [8].

Lokasi Penelitian di kota Surakarta. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari para informan, dokumen, tempat dan peristiwa (Miles, & Huberman, 1992) dengan beberapa teknik, yakni wawancara mendalam kepada guru-guru PPKn dan para siswa. Teknik pengamatan dilakukan untuk melihat proses pembelajaran PPKn di kelas, kemudian analisis isi / metode simak, dan diskusi kelompok terarah dengan para pakar. Keabsahan data menggunakan triangulasi data dan analisis data menggunakan analisis interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-bentuk Perekat Sosial Masyarakat dan Edukasi Harmoni Sosial

Berdasarkan hasil penelitian dilaporkan bahwa bentuk-bentuk perekat sosial dan edukasi harmoni sosial di kalangan siswa SMA/SMK di kota Surakarta dapat dikelompokkan menjadi lima macam. Kelima macam itu meliputi pembelajaran nilai-nilai kebhinekaan, menghargai pendapat teman, mengakui perbedaan, keramahan dalam pergaulan, dan berfikir positif.

a. Pembelajaran Nilai-nilai Kebhinekaan

Nilai-nilai kebhinekaan telah diajarkan oleh para guru PPKn dan dalam praktik terintegrasi pada materi pelajaran. “Dalam

pembelajaran, guru PPKn mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan di kelas X semester 2” (W: TAA & SIM/SMAN7/14-05-2018). Informan lain menyatakan bahwa materi kebhinekaan secara tegas terdapat pada sub “Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan” dan terintegrasi dalam materi “Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara” kelas X semester 2 (W: TAAR/SMAN7/14-05-2018). Kemudian, hasil observasi saat aktivitas pembelajaran PPKn di sebuah kelas SMAN 4 Surakarta tampak bahwa guru telah mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai kebhinekaan, perekat sosial, dan edukasi harmoni sosial. Guru mengajak siswa untuk saling menghargai antar sesama di masyarakat, meskipun berbeda agama dan suku.

Selanjutnya, dari hasil pengisian angket 60 siswa sebagai responden, hasilnya bahwa sekitar 82% siswa menjawab materi Kebhinekaan terdapat di kelas X semester 2 dengan materi “Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan”. Sementara 10% responden memilih jawaban di kelas X semester 1, sebanyak 5% responden memilih jawaban XI semester 1, dan sebanyak 3% responden memilih jawaban di kelas XI semester 2. Hasil pengisian angket bisa menjadi gambaran bahwa materi nilai-nilai kebhinekaan pada pembelajaran PPKn di sekolah sudah diberikan pada siswa.

Materi kebhinekaan yang diberikan oleh guru kepada siswa berkaitan dengan nilai-nilai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial. Menurut AH, “Pelajaran PPKn memiliki kandungan nilai dan sikap terpuji yang berkaitan dengan perekat sosial dan edukasi harmoni sosial” (W: AH &

MUH/SMAN4/04-06-2018). Menurut AH nilai-nilai edukasi harmoni sosial dalam PPKn terdapat di kelas X Kompetensi Dasar (KD) 3.5 dan 3.6 serta di kelas XII KD 3.1, 3.2, & 3.4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelajaran PPKn di SMA telah memuat nilai-nilai kebhinekaan, perekat sosial, dan edukasi harmoni sosial yang tersebar di kelas XI dan XII.

b. *Menghargai Pendapat Teman*

Nilai-nilai kebhinekaan, perekat sosial, dan edukasi harmoni dapat diwujudkan siswa dengan menghargai pendapat teman. “Bahwa perbedaan pendapat sering muncul dalam sebuah momen aktivitas di sekolah, misalnya: ketika rapat di kelas, rapat OSIS, diskusi di kelas, hingga melaksanakan tugas kelompok. Menurut PGS yang aktivis organisasi sekolah dan RST, bahwa mereka ini “selalu berusaha menghargai pendapat teman lain jika berbeda pendapat, terutama saat diskusi di kelas” (W: PGS & RST/SMAM1/15-05-2018).

Hasil wawancara dicek dengan melihat aktivitas pembelajaran PPKn di sebuah kelas SMAN 4 Surakarta. Dalam pembelajaran, tampak bahwa nilai-nilai kebhinekaan telah terwujud dari aktivitas pembelajaran PPKn di kelas. Siswa saling menghargai

pendapat sehingga akan menciptakan sebuah perekat sosial dan edukasi harmoni sosial. Hubungan antar siswa yang akrab tidak menimbulkan konflik yang bisa mengakibatkan perselisihan.

Selanjutnya, data angket tentang situasi jika muncul perbedaan pendapat di kalangan siswa menunjukkan bahwa sekitar 79% siswa menjawab jika munculnya perbedaan terjadi saat rapat OSIS, rapat di kelas, dan diskusi di kelas. Kemudian 21% responden mengatakan jika munculnya perbedaan pendapat terjadi saat mengerjakan tugas kelompok. Hasil pengisian angket menjadi gambaran bahwa perbedaan pendapat terkadang muncul di kalangan siswa, sekaligus siswa berusaha menghargai munculnya situasi tersebut. Sikap menghargai pendapat antara siswa bisa menjadi bukti bahwa nilai kebhinekaan sudah nampak pada siswa SMA di Kota Surakarta. Saling menghargai pendapat di antara siswa juga diakui guru SMAN 7 yang berinisial TW dan SIS. “Sudah biasa siswa mengalami perbedaan pendapat saat diskusi atau rapat di sekolah. Namun siswa harus tetap saling menghargai pendapat orang lain sehingga tidak menimbulkan konflik” (W: TW/SMAN7/06-06-2018).



Sumber gambar: Observasi Peneliti (2018)

Gambar 1. Proses Diskusi Saat Pembelajaran PPKn di SMAN 4 Surakarta

c. *Mengakui Perbedaan*

Sekolah merupakan perwujudan komunitas masyarakat dalam skala kecil. Di sekolah muncul keragaman mulai dari latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, etnis hingga agama. Perbedaan merupakan sesuatu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa terjadi dimana juga. Namun dalam kenyataannya, seluruh warga sekolah dapat menerima perbedaan yang ada sebagai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial.

Tidak hanya guru, siswa juga mewujudkan sikap saling mengakui perbedaan. Gambaran umum perilaku siswa SMA Kota Surakarta yang mencerminkan sikap mengakui perbedaan terungkap dari beberapa hasil wawancara kepada BR dan LWW. “Di sekolah ini ada siswa yang beragama Islam dan juga beragama lain, namun kita saling menghargai perbedaan masing-masing. Selain itu ada juga yang bukan orang Jawa, tapi tetap dihormati. Berkawan dengan semua teman sangat membantu kegiatan sehari-hari saya, walaupun ada perbedaan” (W: BR/SMAN4/16-05-2018). Informan lain AS dan DS yang berasal dari SMAN 4 Surakarta dan SMAN 7 menyatakan bahwa “Dahulu pernah ada siswa yang sakit. Walaupun beragama Kristen, namun siswa yang beragama Islam juga ikut menjenguk. Kami tidak melihat perbedaan keyakinan atau status sosial, jika ada siswa yang mengalami musibah harus diberikan perhatian” (W:

AS/SMAN7/16-05-2018).

Keterangan siswa dibenarkan oleh guru PPKn, yang berinisial NK di SMA 7 Kota Surakarta. Bahwa “salah satu tugas guru adalah membiasakan peserta didik untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan (W: NK/SMA7/16-05-2018)”.

Apa yang dilakukan para guru di atas adalah sesuai dengan konsep pendidikan Multikultural, bahwa dalam pendidikan multikultural diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya lain. Dengan mengeksplorasi akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak didik menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia (Parekh, 1986: 26-27).

d. *Berpikir Positif*

Berpikir positif merupakan salah satu sumber kekuatan seseorang karena hal itu dapat membantu seseorang memikirkan solusi guna memecahkan masalah. Dengan demikian seseorang akan semakin mahir, percaya diri, dan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan. Bentuk berpikir positif bisa

pembelajaran tampak EP telah menerapkan langkah-langkah sebagaimana yang dituangkan dalam RPP. Meski tidak seluruh yang ada di RPP dipraktikan, namun secara umum alur pembelajaran tidak melenceng jauh.



Sumber: Observasi Peneliti (2018)

Gambar 2. Proses Pembelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta

Selanjutnya berdasarkan angket yang diberikan, bahwa dari 20 guru PPKn sebagai responden menunjukkan sebagai berikut. Sekitar 93% guru mempersiapkan RPP dengan memodifikasi yang diberikan pusat, MGMP, atau guru lain. Sisanya 7% responden melakukan copy paste. Dalam pembuatan RPP guru berdiskusi dengan teman sejawat di sekolah atau di forum MGMP. RPP yang dibuat secara bersama-sama lebih baik jika dibandingkan dengan yang dibuat sendiri. Hal itu karena akan ada masukan dari rekan sejawat dalam hal menyempurnakan langkah-langkah pada pembelajaran PPKn di kelas.

Guru PPKn menyusun RPP sesuai dengan pendekatan ilmiah sebagaimana yang diinstruksikan dalam Kurikulum 2013. Pendekatan ilmiah yang dimaksud meliputi aspek mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, hingga menyimpulkan. Seperti keterangan TW, bahwa pihaknya otomatis mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan dalam Kurikulum 2013 (W: TW/SMAN7/06-06/2018).

Keterangan TW didukung oleh Sla, bahwa “Dalam RPP harus memuat pendekatan ilmiah yang berupa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. RPP harus

memuat aspek-aspek tersebut, kemudian diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Aspek-aspek itu selanjutnya dikaitkan dengan materi pelajaran yang akan disajikan” (W: Sla/SMKN2/06-06-2018).

Hasil wawancara dan observasi dicek dengan pencatatan arsip di RPP yang dibuat guru sebelum pembelajaran PPKn di kelas. Terlihat pada RPP dengan tema “Toleransi antar Umat Beragama” memuat aspek-aspek pendekatan ilmiah. RPP yang sudah dibuat ini telah menjadi acuan guru saat pembelajaran PPKn di kelas. Berdasarkan deskripsi data di atas tampak bahwa guru PPKn dalam proses pembelajaran di kelas sudah membuat RPP dengan pendekatan ilmiah. Guru telah mengkombinasikan berbagai metode dalam pembelajaran, seperti tanya jawab, diskusi, atau penugasan.

Pelaksanaan Pembelajaran PPKn

Sesuai dengan RPP yang dibuat, Guru PPKn SMA/SMK Surakarta telah memasukan langkah-langkah pendahuluan, inti, dan penutup. Hal tersebut terungkap dari keterangan beberapa guru yang menjadi narasumber. Menurut Ibu Un yang mengajar PPKn di SMKN 2 Surakarta, pihaknya selalu membuka pelajaran dengan salam terlebih dahulu.

Kemudian disusul dengan mengulang materi pelajaran terdahulu dan sedikit memberikan rangkuman materi yang akan diberikan di hari tersebut. Setelah itu proses kegiatan inti pembelajaran dipraktikan, sesuai dengan acuan yang telah dibuat di RPP. Terakhir aktivitas ditutup dengan menyimpulkan materi pelajaran yang diterima, sekaligus pemberian tugas. Meskipun langkah yang dipraktikan tidak sama persis seperti yang tertuang di RPP, namun secara umum langkah-langkah di kelas telah mengacu dari RPP yang sudah dibuat.

Keterangan berikutnya didapatkan dari AP yang mengajar PPKn di SMAN 4 Surakarta, “jika saat pembukaan hal-hal yang dilakukan adalah mengucapkan salam dan mengulang sekilas materi terdahulu. Kemudian pada kegiatan inti adalah mempraktikan langkah-langkah metode dan strategi yang sudah dibuat dalam RPP. Pada kegiatan penutup menarik kesimpulan bersama siswa dari pembelajaran yang dilakukan (W:AP/SMAN4/07-06-2018).

Data di atas dicek dengan angket yang diberikan kepada Guru PPKn sebanyak 20 orang. Dalam angket tersebut ada pertanyaan mengenai aktivitas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dari hasil pengisian angket 92% responden lebih menjawab bahwa dalam aktivitas pendahuluan dilakukan dengan mengucapkan kabar, menanyakan kabar, mengulang materi sebelumnya, memberikan ringkasan materi yang akan dipelajari saat itu, dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Terkait kegiatan inti sekitar lain pihak 89% guru mempraktikan metode & strategi yang digunakan; mengarahkan siswa; mengomentari aktivitas siswa, dan menjaga kenyamanan kelas. Kemudian 75% guru dalam penutupan melakukan

aktivitas memberikan kesimpulan dan membahas sedikit materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dapat diperoleh gambaran bahwa aktivitas guru PPKn dalam mengajar mengacu pada langkah-langkah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup yang sudah dibuat pada RPP.

a. *Penilaian Pembelajaran PPKn*

Guru dituntut menguasai kemampuan dalam memberikan penilaian pada siswa. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai wujud proses evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penilaian tersebut guru bisa mengetahui kemampuan yang dikuasai oleh siswa di sekolah. Guru dalam menilai harus mengetahui kompetensi dasar (KD) apa perlu dikuasai oleh siswa, sehingga bisa menjadi acuan saat mengambil tindakan perbaikan. Melakukan penilaian atau pemberian tugas juga dilakukan oleh guru PPKn di Kota Surakarta.

Menurut PH, penilaian meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara lebih khusus ada pula penilaian sikap sosial dan spiritual yang dilakukan pada siswa (W: PH/SMKM1/07-06-2018). Informasi tersebut dikuatkan oleh Sis, yang mengatakan: “Proses penilaian sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa. Bentuk penilaian bisa tes atau non tes. Secara khusus yang dinilai adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru bisa melihat dari hasil ulangan siswa dan keaktifan siswa saat tanya diskusi di kelas. Ada pula penilaian sikap spritual dan sosial untuk siswa” (W: Sis/SMAN7/07-06-2018).

Kemudian berdasarkan angket yang diberikan kepada 20 guru sebagai responden. Hasilnya, 95% menjawab bahwa guru melakukan evaluasi meliputi kompetensi sikap sosial, keterampilan, pengetahuan, dan sikap spritual. Sementara itu

5% sisanya hanya memilih satu atau dua jawaban di atas. Kemudian terkait penugasan, sekitar 81% guru menjawab memberikan tugas dengan bentuk fortopolio, meresume, dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa. Sementara sisanya kombinasi antara jawaban di luar pilihan tersebut. Dapat diperoleh gambaran bahwa aktivitas guru PPKn dalam melakukan penilaian tidak jauh dari RPP yang sudah dibuat.

3.2 Kebutuhan Optimalisasi Pembelajaran PPKn Berbasis Kebhinekaan

Kurikulum 2013 menekankan guru PPKn memiliki kompetensi profesional yang tidak hanya mampu merancang pelaksanaan pembelajaran pada ranah kognitif tetapi juga ranah afektif. Pengembangan ranah afektif tidak hanya sebagai pengantar saja, tetapi dimasukkan ke dalam silabus kurikulum 2013. Itu artinya guru PPKn harus mampu mengembangkan kemampuan diri agar terwujud optimalisasi manajemen dalam pembelajaran, khususnya yang berbasis nilai-nilai Kebhinekaan. Materi pelajaran PPKn yang syarat muatan multikultural menjadi salah satu alasan perlunya pembelajaran yang berbasis Kebhinekaan.

a. Guru PPKn dan kesadaran civic literacy, civic skill, and participation

PPKn memiliki peranan penting dalam mempersiapkan warga negara yang bertanggungjawab guna mengembangkan sistem politik yang demokratis. PPKn sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis memiliki peran dalam mewujudkan siswa agar memiliki kesadaran *civic literacy, civic skill, and participation* (W: Muh/SMAN4/06-06/2018). Kombinasi strategi dan metode pembelajaran perlu dioptimalkan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu pemberian tugas juga perlu dimaksimalkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (W: Muh/SMAN4/06-06-2018). Kemudian menurut LWW, pembelajaran PPKn di kelas harus mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia. Tidak lupa guru juga harus memberikan keteladanan pada siswa sehingga bisa lebih berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang aktif. Salah satu bentuk positif keaktifan siswa sebagai warga negara adalah mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2018 (W: LWW/SMKM4/06-06-2018).



Sumber: Observasi Peneliti (2018)

Gambar 3. Upacara 17 Agustus 2018 di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta sebagai Wujud dari *Civic Literacy, Civic Skill, and Participation*.

Data pengisian angket menunjukkan bahwa dari 20 guru PPKn di SMA/SMK yang menjadi responden.

Hasilnya 77% guru PPKn sebagai responden menjawab jika usaha dalam mewujudkan siswa agar memiliki

kesadaran sebagai warga negara adalah dengan memaksimalkan strategi & metode pembelajaran; memberikan keteladanan; memberikan tugas; penyampaian materi yang *up to date*, dan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Sementara itu 23% sisanya memilih salah satu jawaban di atas. Hasil lainnya adalah 74% guru PPKn sebagai responden menjawab jika usaha dalam mewujudkan agar siswa memiliki partisipasi sebagai warga negara adalah dengan memaksimalkan strategi & metode pembelajaran; memberikan keteladanan; memberikan tugas; penyampaian materi yang *up to date*, dan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Sementara itu sisanya 26% responden memilih satu jawaban di atas. Dengan demikian guru PPKn sudah berusaha mewujudkan kesadaran dan partisipasi siswa sebagai warga negara yang baik.

b. Usaha Guru dalam Mengembangkan Pembelajaran PPKn

Usaha guru dalam mengembangkan pembelajaran PPKn diungkapkan oleh NK, guru PPKn di SMKN 7 Surakarta. Menurut NK bahwa usaha yang dilakukan dengan membaca buku dan berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian UN, dari SMKN 2 mengatakan bahwa usaha yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Hanya saja membaca buku, berdiskusi atau pun mengikuti kegiatan sosial terkadang tidak maksimal karena keterbatasan waktu.

Berbagai hal sebenarnya bisa dilakukan guru PPKn dalam upaya mengembangkan pembelajaran agar terwujud optimalisasi manajemen pembelajaran. Salah satunya dengan pelatihan sendiri di sekolah atau *in house training* (IHT) dalam penyusunan perangkat pembelajaran dengan pendekatan *scientific* berdasarkan Kurikulum 2013. Pelatihan akan memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan Kurikulum 2013 mulai dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

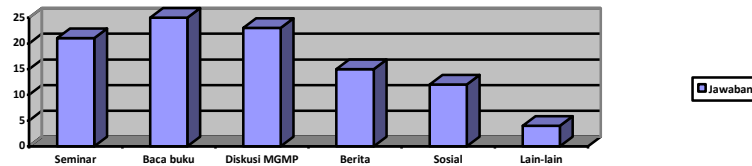


Sumber: Observasi Peneliti (2018)

Gambar 4. Kegiatan IHT & Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SMAM 1 Surakarta.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan IHT telah diselenggarakan guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta bulan Juli 2018. Terdapat tiga pembicara sebagai pengisi kegiatan ini yakni Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum; Drs. Edy Pudyanto, M. Pd; dan Dr. Rahayuningsih, S.Pd.,M.Pd. IHT sekaligus workshop peningkatan kompetensi diikuti oleh 55 guru secara kondusif, termasuk guru mata pelajaran

PPKn. Tentu saja kegiatan semacam ini berkontribusi positif bagi guru PPKn secara khusus untuk mengembangkan diri, sehingga terwujud optimalisasi manajemen pembelajaran. Selain itu secara umum harapannya setelah mengikuti IHT sekaligus workshop peningkatan kompetensi ini, guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dapat mengerjakan tagihan administrasi serta kewajiban lainnya.

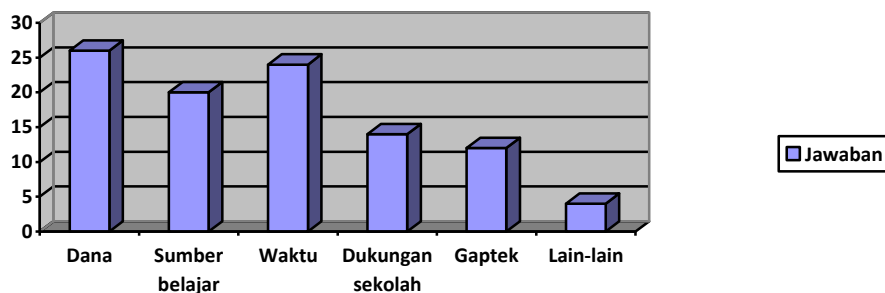


Sumber: Arsip Peneliti (2018)
Gambar 5. Data Usaha dalam Mengembangkan Optimalisasi Manajemen Pembelajaran Berbasis Nilai Kebhinnekaan

Data wawancara dengan observasi dicek dengan hasil angket yang dilakukan oleh 20 guru PPKn sebagai responden. Hasilnya dalam mengembangkan pembelajaran PPKn agar terwujud optimalisasi manajemen pembelajaran dengan 21% mengikuti seminar; 23% membaca buku; 25% berdiskusi dengan teman sejawat; 15% mengikuti perkembangan kondisi masyarakat yang *up to date*; 12% mengikuti kegiatan sosial; dan 4% lain-lain. Terlihat bahwa membaca buku masih menjadi favorit guru-guru dalam mewujudkan optimalisasi manajemen pembelajaran. Realitanya keterbatasan waktu dan dana masih sering ditemui para guru, sehingga tidak maksimal dalam mewujudkan optimalisasi manajemen pada pembelajaran PPKn.

c. *Kebutuhan Model Optimalisasi Manajemen Pembelajaran PPKn*

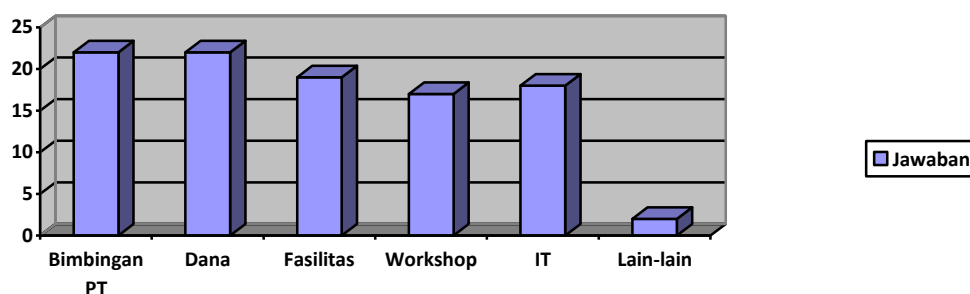
Usaha guru dalam mengembangkan optimalisasi manajemen pembelajaran PPKn berbasis Kebhinnekaan sebagai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial bukan tanpa hambatan. Kesulitan yang muncul menurut Sis, guru PPKn di SMAN 7 Surakarta, jika keterbatasan dana menjadi kendala dalam proses pengembangan optimalisasi manajemen pembelajaran PPKn berbasis Kebhinnekaan sebagai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial. Sementara itu, AP mengatakan jika keterbatasan waktu menjadi faktor yang paling dominan sebagai penghambat. Hasil pengisian angket oleh 20 sebagai responden menunjukkan jika 26% keterbatasan dana, 20% keterbatasan sumber belajar, 24% keterbatasan waktu, 14% tidak mendapatkan dukungan dari sekolah, 12% gapap teknologi, dan 4% lain-lain.



Sumber: Arsip Peneliti (2018)
Gambar 6. Hambatan dalam Pengembangan Pembelajaran PPKn

Guru membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Menurut AH “bimbingan dari perguruan tinggi sangat diperlukan” (W: AH/SMAN4/06-06-2018). Sementara itu Muh menganggap jika “kemudahan mengikuti seminar atau workshop sangat

dibutuhkan” (W: Muh/SMAN4/06-06-2018). Di satu sisi R, mengatakan jika “pelatihan IT harus dilakukan sehingga guru bisa berpengalaman dalam mencari sumber referensi melalui internet” (W: R/SMAM1/06-06-2018).



Sumber: Arsip Peneliti (2018)

Gambar 7. Kebutuhan Guru PPKn dalam Pengembangan Pembelajaran

Selanjutnya, data dari angket menunjukkan bahwa 22% guru membutuhkan bimbingan dari perguruan tinggi, 22% sumbangan dana, 19% sumbangan fasilitas, 17% kemudahan mengikuti seminar, 18% pelatihan IT, dan 2% lain-lain. Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa guru membutuhkan berbagai hal dalam pengembangan model optimalisasi manajemen pembelajaran PPKn berbasis kebhinekaan sebagai perekat sosial masyarakat multikultural dan edukasi harmoni sosial.

4. KESIMPULAN

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, siswa SMA/SMK Kota Surakarta mewujudkan sikap kebhinnekaan sebagai perekat sosial dan edukasi harmoni sosial dalam aktivitas di sekolah dengan bentuk menghargai pendapat, mengakui perbedaan, ramah dalam pergaulan, dan berfikir positif terhadap perilaku teman. *Kedua*, dalam praktik pembelajaran di sekolah, guru PPKn melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan instruksi dalam Kurikulum 2013 dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dan praktik di kelas yang mengacu pada pendekatan ilmiah (*scientific approach*). *Ketiga*, guru PPKn dalam optimalisasi fungsi manajemen membutuhkan bimbingan dari perguruan tinggi, tambahan dana, fasilitas, kemudahan mengikuti seminar, dan pelatihan informasi teknologi (IT).

REFERENSI

- [1] Rosyada, Dede. (2014). "Pendidikan Multikultural di Indonesia sebuah Pandangan Konsepsional". *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. I No. 1 2014. Jakarta: UIN. Hal 1-12.
- [2] Azra, A. (2006). "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- [3] Adhani, Yuli. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. I No. 1 2014. Jakarta: UIN. Hal 111-121
- [4] Samiyono, David. (2017). "Membangun Harmoni Sosial: Kajian Sosiologi Agama tentang Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Harmoni Sosial". *Jurnal Sosiologi Walisongo*. Vol 1, No 2. Semarang: Universitas Islam Negeri Walingoso. Hal 195-206.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.
- [6] Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim. (2008). PPKn dan Masyarakat Multi-kultural, Prodi PPKn-Sekolah Pascasarjana-UPI Bandung: Bandung
- [7] Samsuri. (2010). Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan

- Kewarganegaraan. ACTA CIVICUS, 2 (2). pp. 169-180. ISSN 1978-8428.
- [8] Gall, Meredith D, Gall, Joyce P, & Borg, Walter R. (2003). Educational Research, An Introduction (Seventh Ed). Boston: Allyn and Bacon.
- [9] Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Sage Publica